

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amiruddin, and Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly, and Ali Safa'at. 2014. *Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian Tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi)*. Jakarta: Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi.

Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diecy, A.V. 2007. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*. Bandung: Nusamedia.

Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

—. 2017. *Hukum Acara Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

—. 2014. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huijbers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: Penerbitan Universitas Muhamadiyah Malang.
- Kunarto. 1997. *Hak Asasi Manusia dan Polri*. Jakarta: PT Cipta Manunggal.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Makaraao, Mohammad Taufik, and Suharsil. 2004. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muhamad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kotemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Muladi. 1995. *Kapikta Selekt Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Mustafa, Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Wildan Suyuti. 2013. *Kode Etik Hakim*. Jakarta: Kencana.
- Prints, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- . 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- . 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahayu. 2015. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Renggong, Ruslan. 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- . 2014. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salam, Moch Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.
- Sarwono, and Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sofyan, Andi Muhammad, and Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Sudarto. 2018. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sulchan, Achmad. 2021. *Hukum Acara Pidana dan Sistem Peradilan Pidana dalam Praktek Beracara*. Semarang: Unissula Press.
- Sumarsono, Soni. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. JURNAL, DAN SUMBER LAINNYA

- Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. n.d. *KBBI*. Accessed Desember 12, 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

- Efendi, Saparudin, Rodliyah, and Rina Khairani Pancaningrum. 2021. "Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap (Error In Persona)." *Jurnal Education and Develompment* .
- Juanda, Enju. 2016. "Konstruksi Hukum dan Metode Interpretasi Hukum." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- KONTRAS. 2020. "Laporan Tahunan Hari Bhayangkara ke-74: Tak Kenal Prioritas Semua Ditebas." *KONTRAS*. Juni 30. Accessed Februari 5, 2023. <https://kontras.org/2020/06/30/laporan-tahunan-hari-bhayangkara-ke-74-tak-kenal-prioritas-semua-diterabas/>.
- KONTRAS. 2022. "Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau merendahkan Martabat." *KONTRAS*.. Accessed Mei 19, 2023. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2022/06/Draft-Final-Laporan-Penyiksaan-KontraS-2022-FINAL.pdf/>.
- LBH Jakarta. 2022. "Catahu 2022 "Senjakala Demokrasi: Di Bawah Kendala Oligarki"." *LBH Jakarta*. Accessed Februari 5, 2023. <https://bantuanhukum.or.id/catahu-2022-senjakala-demokrasi-di-bawah-kendali-oligarki/>.
- Nurrohman, Wahid, and Pudji Astuti. 2018. "Analisis Yuridis Pemasungan Terhadap Orang dengan Gangguan Jiwa dikaitkan dengan Pasal 333 ayat (1) KUHP Tentang Perampasan

Kemerdekaan (Studi Kasus di desa Krebet, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo)." *Jurnal Novum*.

P, Muhamad Schinggyt Tryan, Nyoman Serikat Putrajaya, and Pujiyono. 2016. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal*.

Pengadilan Negeri Pariaman. n.d. *Pengadilan Negeri Pariaman*. Accessed December 14, 2022. <https://pn-pariaman.go.id/layanan-hukum/91-tentang-pengadilan.html>.

Purbawan, Arfandy. 2011. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Korban Salah Tangkap yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." Universitas Brawijaya. *Tesis*. Malang.

Rahardjo, Satjipto. 2003. "Mengkaji Kembali Peran dan Fungsi Polri dalam Era Reformasi." *Makalah Seminar Nasional*. Jakarta.

Rohman, Syarif Abdul, and Umi Rozah. 2020. "Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*.

Sasmita, Rangga. 2016. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Penanganan Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Kota Mataram)." *Jurnal Law Reform*.

Setiadi, Wicipto. 2009. "Sanksi Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Legislasi Indonesia*.

C. PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.

01/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012

Putusan Nomor 697/PID.B/2021/PN.Ckr

Putusan Nomor 170/PID.B/2022/PT.BDG

Putusan Nomor 1351 K/PID/2022